

BAB III

DINAMIKA KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DALAM ISU LINGKUNGAN

Dunia internasional menyadari bahwa Amerika merupakan satu-satunya negara adidaya terbesar saat ini. Perannya sentral Amerika tentu mempengaruhi berbagai dinamika politik dalam berbagai isu-isu internasional yang kian berkembang terutama mengenai isu lingkungan khususnya perubahan iklim. Pada bab ini, penulis akan paparkan bagaimana dinamika kebijakan lingkungan Amerika dimulai dari masa pemerintahan Presiden Nixon yang merupakan masa titik balik Amerika mulai terlibat dan konsen terhadap isu lingkungan hingga kebijakan lingkungan Amerika pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump yang saat ini sedang menjabat.

A. Dinamika Kebijakan Lingkungan Amerika Serikat Era Pemerintahan sebelum Obama dan Trump

Meninjau dari sejarahnya, Perjanjian Paris bukan merupakan suatu perjanjian yang terbentuk begitu saja, namun hal tersebut tentu melalui proses panjang yang tercipta dari hasil pembaharuan kesepakatan-kesepakatan yang telah ada sebelumnya. Sepanjang proses tersebut berlangsung, Amerika mengalami dinamika kebijakan yang berubah-ubah dalam posisinya terkait isu lingkungan khususnya dalam masalah perubahan iklim. Hal tersebut tidak terlepas dari peranan pemimpin-pemimpin yang memiliki andil dalam mengambil kebijakan disetiap periode pemerintahannya.

Amerika Serikat mulai muncul dan terlibat dalam rezim lingkungan global yaitu ditahun 1970-an ketika Amerika berada dibawah kepemimpinan Presiden Richard Nixon. Contoh aksi-aksi yang pernah dilakukan Amerika pada periode kepemimpinannya yaitu dimana Amerika mampu menjadi pelopor undang-undang perlindungan lapisan ozon yaitu *Clean Air Act* 1970 dan pelestarian spesies langka yaitu *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* 1973. Kongres Amerika juga mengeluarkan undang-undang lain seperti *Resource Conservation and Recovery Act*, *Federal Water Pollution Control Act*, *the Marine Mammals Protection Act*, dan *The National Forest Management Act* (Falkner, 2005).

Namun, kebijakan-kebijakan pro-lingkungan Amerika mulai berubah ketika berada dibawah kepemimpinan George H.W. Bush atau yang dikenal dengan sebutan Bush Senior. Hal ini dibuktikan dengan sikap penolakannya terhadap *Convention on Biological Diversity* yang merupakan hasil produk dari Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT Bumi) terkait konservasi keanekaragaman hayati pada tahun 1992. Selain itu, Bush Senior juga memberikan respon yang negatif ketika konferensi perubahan iklim diadakan di Washington DC pada tahun 1990 dimana dalam konferensi tersebut Bush senior mengatakan bahwa tak ada tindakan apapun yang harus diambil sampai ilmu perubahan iklim lebih jelas dan pasti. Bush senior juga berpendapat bahwa langkah lebih baik jika dana ekonomi yang disediakan untuk perubahan iklim digunakan untuk bidang lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Schreurs, 2004).

Anggapan Bush Senior dalam merespon isu lingkungan dilatar belakangi akibat kurangnya bukti-bukti terkait perubahan iklim mengingat pada tahun 199-an teknologi belum secanggih saat ini dan belum banyak timbul dampak-dampak dari perubahan iklim yang

dianggap mampu mengancam kehidupan di bumi. Pemikiran Bush Senior dianggap cukup skeptis dalam merespon isu perubahan iklim terlebih ketika presiden Bush Senior menjabat, kala itu tatanan global sedang mengalami goncangan Perang Dingin dan Amerika merupakan salahsatu aktor utama di dalamnya. Oleh karena itu perhatian Amerika tidak hanya berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan isu lingkungan saja (Desombre, 2010, pp. 192-193).

Setelah kepemimpinan Bush Senior berakhir ditahun 1993, Amerika kemudian dipimpin oleh presiden baru yaitu William Jefferson Clinton atau publik menyebutnya Bill Clinton. Dalam periode ini, Bill Clinton dan pemerintahannya cukup *concern* terhadap isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan. Hal ini dilatar belakangi oleh momentum yang tepat yang mana ketika Bill Clinton menjabat, suasana Perang Dingin mulai berakhir sehingga mengubah tatanan global dan menjadikan isu-isu konvensional mulai muncul. Sebagai pemimpin negara terkuat kala itu, Clinton merupakan aktor utama yang dianggap memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa Amerika adalah “*The Leader*” bagi negara-negara lain. Hal ini menjadikan Amerika perlu “merangkul” negara-negara lain dalam setiap isu yang mulai berkembang. Clinton membuktikannya melalui kebijakan-kebijakan luar negerinya yang mengarah pada promosi perdamaian, hak asasi manusia, hingga dukungannya terhadap isu lingkungan.

Dukungan yang diberikan Clinton terhadap isu lingkungan tepat ketika isu perubahan iklim mulai dibicarakan dalam putaran-putaran pertemuan (COP) yang diselenggarakan oleh UNFCCC. Dibawah pemerintahannya, Amerika aktif terlibat dalam setiap pertemuan tersebut yang kemudian menghasilkan suatu protokol berupa Protokol Kyoto. Clinton mendukung hasil kesepakatan tersebut dengan menandatangani Protokol

Kyoto sehari sebelum COP ke-4 berakhir. Namun hal ini tidak disetujui oleh kongres Amerika yang tegas mengatakan bahwa mereka menolak ratifikasi protokol tersebut sehingga menjadikan keseluruhan skema pada implementasi protokol Kyoto menjadi tertunda mengingat posisi Amerika sebagai Negara berpengaruh dalam kesepakatan tersebut (Schreurs, 2004, pp. 177-178).

Selain itu, kebijakan lingkungan Clinton lainnya yang membuktikan bahwa Clinton cukup peduli terhadap isu lingkungan yaitu terkait kebijakan pro-mitigasi perubahan iklim yang diusulkannya pada tahun 1993 berupa pajak *British Thermal Unit / BTU*. Pajak tersebut merupakan upaya hukuman yang diberikan bagi pencemar emisi gas rumah kaca bagi warga Amerika Serikat. Walaupun usulan tersebut gagal karena kembali tidak mendapat dukungan dari kongres, namun hal ini menunjukkan bahwa posisi politik Clinton akan isu lingkungan lebih progresif jika dibandingkan dengan presiden sebelumnya.

Berakhirnya masa jabatan Clinton yang kemudian digantikan oleh presiden selanjutnya menjadikan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh presiden tersebut menjadi begitu penting karena akan mempengaruhi posisi Amerika dalam rezim lingkungan global dan menentukan masa depan rezim. Goerge W. Bush yang merupakan anak dari Bush Senior berhasil menggantikan posisi Clinton sebagai Presiden Amerika selanjutnya. Namun terpilihnya Bush sebagai presiden justru menjadikan Amerika semakin menjauh dari komitmen rezim lingkungan global.

Goerge W. Bush atau yang kerap dipanggil Bush Junior tidak menjadikan isu lingkungan sebagai agenda prioritas utamanya. Hal ini disebabkan karena pada masa periode pemerintahannya, isu lingkungan tidak menjadi perhatian utama Amerika. Amerika pada saat itu kian

fokus perhatiannya terhadap isu keamanan dan pertahanan khususnya terkait ancaman terorisme. Isu terorisme mulai diperbincangkan sejak terjadinya serangan 11 September 2001, tahun ketika Presiden Bush mulai memimpin. Menurut laporan tim investigasi 911, Serangan itu berhasil menghancurkan Menara Kembar *World Trade Center* (WTC) di New York City, *The Pentagon* di Arlington-Virginia, dan menewaskan sekitar 3.000 jiwa. Kejadian tersebut diduga dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda yang disebut sebagai kelompok terorisme (Widyaningrum, 2018).

Sejak tragedi besar yang menimpa Amerika kala itu, maka fokus perhatian politik luar negeri Presiden Bush yaitu perang melawan terorisme dengan melakukan banyak penyerangan ke negara-negara di Timur Tengah yang dianggap sebagai dalang di balik penyerangan tersebut. Serangan-serangan invasi ke Timur Tengah mengakibatkan dampak buruk terhadap perekonomian dalam negeri karena besarnya anggaran militer yang diperlukan saat itu. Oleh karena hal tersebut, isu lingkungan khususnya terkait perubahan iklim tidak menjadi fokus utamanya dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat mengingat akan ada dampak ekonomi pula yang akan ditimbulkan jika ikut mengatasi perubahan iklim. Hal ini yang kemudian menjadi latar belakang mengapa Presiden Bush mencoba menjauhkan Amerika dari kebijakan isu lingkungan internasional walaupun keadaan lingkungan dalam lingkup global kala itu sudah mulai terasa semakin memburuk (Cipto, 2018, p. 66).

Menjauhnya Amerika dibuktikan ketika Bush menyatakan bahwa dia menentang Protokol Kyoto yang dianggapnya bukan suatu pendekatan yang tepat dalam mengatasi perubahan iklim. Bush mengatakan bahwa Protokol Kyoto akan mengakibatkan kerugian besar bagi perekonomian dan pekerja AS. Bush ingin Protokol Kyoto juga memberikan beban yang sama kepada negara

berkembang terkait pengurangan emisi khususnya bagi China dan India yang juga merupakan penyumbang emisi terbesar sehingga menjadikan rezim tersebut terkesan lebih adil yang tidak hanya memberatkan negara maju.

Penentangan pemerintahan Bush diperlihatkan ketika rezim lingkungan global melakukan pertemuan COP ke-6 tahap kedua di Jerman, COP ke-7 di Maroko, dan COP ke-8 di India yang mana Amerika lebih memilih untuk tidak berpartisipasi dalam perundingan yang berhubungan dengan Protokol Kyoto dan memilih untuk bertindak hanya sebagai *observer*. Dalam COP ke-13 di Bali, Amerika juga menolak usulan terkait pengurangan emisi sebesar 40-45 persen yang ditunjukkan untuk Negara annex1. Perubahan kebijakan ini menjadikan Amerika tidak lagi disebut sebagai Negara pendukung / *Supporting State* dalam rezim lingkungan global, namun telah menjadi *swing state* yang hanya ingin berkomitmen jika syarat tertentu telah dipenuhi (Asheline, 2007, p. 15).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terlihat bagaimana setiap presiden yang menjabat memiliki kebijakannya masing-masing dalam merespon isu lingkungan khususnya terkait perubahan iklim. Kebijakan yang dikeluarkan setiap presiden berbeda-beda tergantung dengan isu apa yang sedang berkembang dalam periode pemerintahannya sehingga mempengaruhi posisi isu lingkungan untuk masuk sebagai agenda prioritas atau tidak, mengingat ada isu yang lebih "*urgent*" untuk direspon. Untuk memudahkan pembaca membandingkan kebijakan yang dikeluarkan oleh keempat presiden, maka berikut penulis ringkas bagaimana setiap presiden mengeluarkan kebijakannya seperti yang telah dipaparkan di atas.

Tabel 3.1 Presiden dan Kebijakannya

Presiden	Periode	Kebijakan
Nixon (Titik balik awal Amerika mulai muncul dan terlibat dalam rezim lingkungan global)	1969-1974	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amerika menjadi pelopor undang-undang perlindungan lapisan ozon & pelestarian spesies langka
Bush Senior	1989-1993	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menolak <i>Convention on Biological Diversity</i> (hasil produk dari KTT Bumi).
Clinton	1993-2001	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengusulkan kebijakan pro-mitigasi perubahan iklim. ▪ Menandatangani Protokol Kyoto (produk hasil kesepakatan UNFCCC), walaupun ratifikasinya ditolak oleh Kongres.
Bush Junior	2001-2009	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menentang Protokol Kyoto. ▪ Melibatkan Amerika dalam COP-6,7, dan 8 hanya sebagai <i>observer</i> (tidak ikut berpartisipasi). ▪ Dalam COP-13 di Bali, menolak usulan terkait pengurangan emisi sebesar 40-45 persen bagi negara Annex 1.

(Data diolah dari berbagai sumber)

Terlihat dari sejarah yang bermula ketika Amerika mulai terlibat dalam rezim lingkungan global hingga pada posisi justru semakin menjauh dengan rezim tersebut, membuat Amerika mengalami dinamika dalam posisinya terkait isu-isu lingkungan yang dibicarakan dalam berbagai proses yang dilakukan rezim lingkungan global untuk mengatasi perubahan iklim. Sikap dan posisi

Amerika tersebut seringkali dipengaruhi oleh presiden – presiden yang menjabat disetiap periodenya.

B. Kebijakan Lingkungan Amerika Serikat Era Pemerintahan Obama dan Trump

Jika dalam penjelasan sebelumnya penulis telah paparkan bagaimana sikap Amerika dalam merespon rezim lingkungan global dari pemerintahan Amerika dibawah Presiden Nixon yang mana Amerika mulai terlibat dalam rezim lingkungan global hingga Presiden Bush yang mulai menjauhkan Amerika dari keterlibatannya terkait rezim tersebut. Maka berikut akan penulis paparkan bagaimana sikap Presiden Obama sebagai presiden terpilih pengganti kursi kepemimpinan Bush dan sikap Trump sebagai presiden terpilih pengganti kursi kepemimpinan Obama beserta kebijakan-kebijakan yang diambilnya dalam merespon keterlibatan Amerika terkait rezim lingkungan global yang menjadi fokus dalam penelitian skripsi ini.

1. Periode Kepemimpinan Barack Obama

Dalam sub pertama bagian kedua bab tiga ini, penulis akan paparkan bagaimana sikap Amerika dalam merespon isu lingkungan utamanya terkait masalah perubahan iklim ketika Amerika dibawah pemerintahan Presiden Barack Husein Obama. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh paparan fakta-fakta kebijakan yang telah diambil Obama terkait sikapnya tersebut.

a. Sikap Obama dalam Merespon Isu Perubahan Iklim

Barack Husein Obama atau yang dikenal dengan panggilan Obama terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-44 menggantikan

Goerge W. Bush. Pada masa pemerintahannya, banyak perubahan kearah yang positif dalam kebijakannya terhadap lingkungan khususnya mengenai perubahan iklim. Presiden Obama merupakan aktor utama yang selalu mengkampanyekan bahwa isu perubahan iklim merupakan isu penting.

Obama menjalankan berbagai upaya untuk mendukung dan mencapai kesepakatan global terkait perubahan iklim. Meskipun sebelum Obama menjabat, Amerika telah menjadi satu-satunya negara yang menolak untuk meratifikasi Protokol Kyoto namun dibawah pemerintahannya, Amerika berusaha untuk dapat berkomitmen melalui pembangunan negosiasi ulang dalam berbagai COP Konvensi Perubahan Iklim.

Melalui *Copenhagen Accord* (hasil dari perundingan COP-15) yang kemudian telah dikuatkan dengan Perjanjian Paris, Amerika dibawah kepemimpinan Presiden Obama berjanji akan menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca negaranya sebanyak 17% pada tahun dasar 2005 untuk tahun 2020 dan sebanyak 26%-28% untuk tahun 2025. Kebijakan terpentingnya ketika Obama mengubah kebijakan Amerika yang sebelumnya cenderung acuh dan tidak mau terlibat dengan isu lingkungan khususnya perubahan iklim menjadi sangat pro terhadap lingkungan dan isu perubahan iklim (United States Departement of States, 2010).

Obama benar-benar membuktikan bahwa Amerika kini komitmen terhadap upaya mengatasi perubahan iklim. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kebijakan yang diambilnya seperti ditahun 2013 dan 2014, Amerika telah

menyumbangkan dana untuk membantu pembiayaan *Public Climate* sebesar \$ 2,7 Miliar. Amerika juga telah berjanji akan menyumbangkan dana sebesar \$ 3 Milyar pada *Green Climate Fund* (GCF), yaitu alat utama pembiayaan UNFCCC. Hal ini menjadikan Amerika sebagai negara tunggal penyumbang terbesar dalam GCF yang telah berkontribusi dalam mendukung finansial UNFCCC (Urpelainen, 2018).

Kemudian Amerika dibawah kepemimpinan Obama telah membuat kesepakatan perubahan iklim bersama dengan Cina yang kemudian diumumkan ditahun 2014 ketika dalam kunjungannya ke Beijing. Kesepakatan tersebut dikenal dengan istilah *US-China Joint Presidential Statement on Climate Change* (JPSS) yang merupakan kesepakatan kedua negara dalam usahanya untuk menurunkan emisi kotor (Herdi, 2017).

Kebijakan Obama lainnya yang dianggap sangat penting dan mempengaruhi arah masa depan rezim lingkungan global khususnya perubahan iklim yaitu ketika Obama menjadikan Amerika justru masuk ke dalam daftar negara maju tahap awal yang meratifikasi Perjanjian Paris (pembaharuan dari Protokol Kyoto yang dianggap gagal dalam menjalankan misinya) setelah sebelumnya Amerika bersikeras untuk menolak meratifikasi Protokol Kyoto.

Walaupun tidak mendapatkan persetujuan Kongres Amerika khususnya dari mayoritas Partai Republik, Obama menggunakan hak vetonya sebagai Presiden dengan tetap mengambil kebijakan sepihak untuk meratifikasi Perjanjian Paris yang kemudian dilakukan pada tanggal 3

September tahun 2016 bersamaan dengan Cina serta menyerahkan *National Determind Contribution* (NDC) kepada UNFCCC sebagai syarat ratifikasi. Kebijakan ini dianggap sangat penting selain karena akan mempengaruhi masa depan arah rezim tersebut, namun juga akan sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang kemudian akan diambilnya nanti dalam domestik Amerika itu sendiri yang secara tidak langsung juga akan mempengaruhi perekonomian negara tersebut (Roza, 2017, p. 6).

Kebijakan-kebijakan di atas menunjukkan bahwa Amerika dibawah kepemimpinan Obama komitmen dengan sikapnya yang pro terhadap lingkungan. Hal itu dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan internasional yang telah diambilnya untuk selalu melibatkan Amerika dalam rezim lingkungan global khususnya terkait perubahan iklim. Berikut akan penulis paparkan juga mengenai kebijakan-kebijakan nasional yang telah diambil Obama selama masa jabatannya berlangsung karena Obama tidak hanya banyak mengeluarkan kebijakan internasionalnya, namun juga banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan nasional bagi Amerika itu sendiri sebagai bentuk implementasi terkait komitmennya dalam lingkup global.

b. Kebijakan-Kebijakan Nasional Obama terkait Isu Perubahan Iklim

Terdapat 7 (tujuh) kebijakan pro-lingkungan Presiden Barack Obama yaitu:

- i. Obama Menolak Proyek Jalan Pipa XL Stone

Proyek jalan pipa XL Stone adalah suatu proyek pembangunan pipa untuk mengangkut minyak-minyak mentah dari Kanada ke negara-negara Amerika bagian. Pembangunan tersebut direncanakan akan dibangun sepanjang hampir 1.200 mil. Departemen Luar Negeri AS yang dianggap sebagai pihak yang bertugas mengevaluasi proyek-proyek yang melibatkan wilayah perbatasan AS telah mengkaji proyek tersebut bertahun-tahun lamanya. Hasilnya, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa proyek tersebut tidak mewakili kepentingan nasional Amerika itu sendiri.

Barack Obama selaku Presiden Amerika Serikat yang kala itu menjabat setuju dengan hasil kajian Departemen Luar Negeri AS. Beliau berpendapat bahwa proyek pipa minyak tersebut tidak akan memberikan kontribusi besar bagi ekonomi Amerika, harga minyak bagi para konsumen tidak akan turun, dan keamanan energi AS tidak akan meningkat. Pertimbangan tersebut menjadikan Obama mengeluarkan kebijakan untuk menolak berlangsungnya Proyek Jalan Pipa XL *Stone* tersebut.

Keputusan diumumkan sebulan sebelum diadakannya konferensi perubahan iklim PBB di Paris. Namun, kebijakan penolakan tersebut tidak didukung oleh kongres yang mana dikuasai oleh Partai Republik. Partai Republik justru mendukung proyek pembangunan itu dengan argument bahwa Proyek Jalan Pipa XL Stone dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mampu memangkas

ketergantungan AS akan minyak luar negeri (Saine, 2015).

ii. Menaikkan Standar Efisiensi Bahan Bakar

Pada tahun 2009, Presiden Obama mengeluarkan kebijakan terkait bahan bakar mobil dan truk. Obama telah melakukan perjanjian dengan 13 produsen utama agar meningkatkan ekonomi bahan bakar pada tahun 2025 untuk mobil dan truk dari 29,7 mil per galon menjadi 54,5 mil per galon. Kebijakan untuk meningkatkan ekonomi bahan bakar serta mengurangi emisi GRK tersebut diharapkan mampu mengurangi konsumsi minyak AS sekitar 12 miliar barel dan menyelamatkan konsumen \$ 1,7 triliun lebih pompa bensin.

iii. Membangun Cagar Laut Terbesar di Dunia

Pada tahun 2016 tepatnya dibulan Agustus, Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengeluarkan kebijakan berupa penetapan kawasan lindung terbesar di dunia. Peningkatan hingga empat kali lipat ukuran Monumen Nasional Kelautan Papahānaumokuākea yang berada di lepas pantai Hawaii dilakukan oleh Obama dengan memperluas wilayah hingga mencapai batas 200 mil laut ZEE Amerika Serikat. Perluasan tersebut melindungi berbagai spesies laut yang telah terdaftar di dalam Undang-Undang Spesies Terancam Punah seperti penyu laut, ikan paus, karang hitam dengan total jumlah lebih dari 7.000 spesies laut (IPD Forum, 2016).

Tujuan Obama menciptakan kawasan laut terbesar di dunia serta melindungi cagar alam laut tersebut yaitu untuk mempertahankan ekosistem dan menunjukkan bahwa pentingnya melindungi perairan sebagai wujud dalam memerangi perubahan iklim. Menurut *National geographic*, perluasan cagar alam di kawasan Hawaii tersebut telah meningkatkan alokasi kawasan lindung perairan Amerika dari 3 persen hingga 13 persen. Walaupun begitu, kebijakan ini tetap mendapat suatu kritikan khususnya dari Partai Republik yang dianggap sebagai kebijakan sepihak (Davis, 2016).

iv. Menandatangani Larangan Penggunaan *Microbread*

Microbread merupakan butiran-butiran yang terbentuk dari partikel kecil plastik berdiameter kurang dari 5 mm. Penggunaannya biasa dipakai dalam produk perawatan kulit dan pasta gigi, yang mana berfungsi meluruskan sel-sel kulit mati dengan melepas lapisan kulit teratas. Banyak yang mengatakan bahwa *Microbread* ini aman penggunaan bagi kulit. Namun disisi lain, hal ini justru akan berdampak buruk bagi lingkungan, khususnya ekosistem laut (Sociolla, 2019).

Menurut penelitian, *microbread* yang terbuat dari plastik tersebut tidak larut dalam air sehingga mampu mengancam kesehatan lingkungan dan berkontribusi besar dalam mencemari lautan karena sulit untuk dibersihkan akibat ukurannya yang sangat kecil. Hal ini akan berdampak pada makhluk

hidup yang tinggal di dalam laut seperti ikan, cumi-cumi, kepiting, dan lain-lain karena mereka akan menganggapnya sebagai bagian dari makanan. Jika ini berdampak terhadap makhluk hidup dibawah laut, maka otomatis akan berdampak pula pada manusia yang mengkonsumsinya sebagai santapan makanan seafood.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Environmental Science & Technology* melaporkan bahwa setiap harinya telah terdapat lebih dari delapan triliun *microbead* memasuki perairan laut Amerika. Bahkan jika diibaratkan jumlah delapan triliun tersebut cukup menutupi ukuran 300 lapangan tenis. Obama selaku Presiden yang menjabat, pada tahun 2015 Desember telah menandatangani suatu undang-undang larangan mengenai pemasaran produk yang mengandung *microbead* dalam *Microbead-Fee Waters Act of 2015* yang kemudian mulai berlaku efektif ditahun 2017 dan disosialisasikan ke Negara-negara bagian seperti California, New Jersey, dan Connecticut (Detik, 2016).

v. Larangan Penjualan Kemasan Air Berbotol Sekali Pakai di kawasan Taman Nasional

Plastik sekali pakai diidentifikasi menjadi salahsatu sebab dari adanya perubahan iklim. Hal ini diakibatkan karena plastik dapat mengeluarkan gas metana dan etilena ketika rusak dan terkena sinar matahari, gas yang merupakan salahsatu penyebab utama perubahan iklim. Terlebih ketika fakta mengatakan bahwa produk yang digunakan

sekali pakai tersebut tidak bisa didaur ulang. Hal tersebut mendorong pemerintah Amerika untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang mampu mengatasi masalah tersebut.

Pada tahun 2011, Presiden Obama mengeluarkan kebijakan berupa pelarangan penjualan air berbotol di taman nasional. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah pembuangan sampah sembarangan bagi para konsumen yang membelinya dan setidaknya agar mampu mengurangi 1,32 juta botol air plastic. Kebijakan ini terbukti dapat menghemat produksi plastik hingga 111.743 pon, 141 juta ton GRK, dan 3,4 miliar energy termal inggris sehingga kebijakan ini mampu memberikan manfaat positif yang cukup signifikan bagi lingkungan yang sehat (Cama, 2018).

vi. Larangan Penggunaan Timah Sebagai Alat Bantu Berburu dan Memancing

Penggunaan Timah yang digunakan sebagai alat bantu berburu dan memancing berdampak bahaya bagi spesies ikan dan satwa liar. Sebagian besar perburuan liar menggunakan peluru yang mengandung timah sebagai bahan bakunya. Jika spesies ikan dan satwa liar terpapar racun berbahaya didalam tubuhnya, maka hal itu pula akan berdampak pada manusia yang mengkonsumsinya. Banyak penyakit yang timbul akibat keracunan pada kandungan timah seperti halnya sakit perut, muntah, diare, hingga pingsan dan koma (Budiyono, 2016).

Salahsatu kebijakan yang diambil Presiden Obama dalam merespon isu

lingkungan khususnya terkait penggunaan timah yaitu melarang penggunaan timah sebagai alat bantu memancing dan berburu di sebagian kawasan federal Amerika Serikat. Kebijakan ini dianggap cukup baik karena diharapkan dapat mensejahterakan ekosistem laut dan satwa liar, dan mampu mengurangi polusi dan energi sehingga mampu berkontribusi dalam memerangi pemanasan global (Masson, 2017).

vii. Mengadakan Agenda *Clean Power Plan*

Tahun 2015 tepatnya pada bulan Agustus, Presiden Obama dan *Environment Protect Agency* (EPA) mengumumkan kebijakan baru sebagai implementasi dari kesepakatan Amerika Serikat terhadap Perjanjian Paris yaitu *Clean Power Plan*. Kebijakan tersebut terbentuk dari penelitian dan keterlibatan publik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun yang mana telah dibentuk secara adil, fleksibel, berstandar kuat, serta dirancang sedemikian rupa untuk memperkuat tren yang kian berkembang menuju Amerika dengan energi bersih dan berpolusi rendah.

Clean Power Plan merupakan standar nasional yang pertama dalam mengatasi polusi karbon yang bersumber dari pembangkit listrik. Rencana tersebut akan memotong polusi karbon pembangkit listrik dengan jumlah besar serta polutan yang mengakibatkan timbulnya kabut asap yang kemudian akan membahayakan kesehatan manusia. Hal ini secara tidak langsung

mampu mengatasi sedikit ancaman perubahan iklim.

Walaupun bahan bakar fosil akan tetap menjadi komponen utama bagi masa depan Amerika, namun *Clean Power Plan* ini akan memastikan bahwa pembangkit listrik berbahan bakar fosil tersebut mampu beroperasi lebih efisien dan bersih. Tindakan ini sangat penting dalam mengurangi dampak akan perubahan iklim sehingga mampu memberikan kepastian yang baik bagi masa depan kesehatan dan lingkungan, serta bagi generasi yang akan datang (EPA, 2017).

2. Periode Kepemimpinan Donald Trump

Dalam sub kedua ini, penulis akan paparkan bagaimana sikap Amerika dalam merespon isu lingkungan utamanya terkait masalah perubahan iklim ketika Amerika dibawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh paparan fakta-fakta kebijakan yang telah diambil Trump terkait sikapnya tersebut.

a. Sikap Trump dalam Merespon Isu Perubahan Iklim

Sejak terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika yang ke-45 menggantikan Barack Obama, banyak kebijakan-kebijakannya yang dianggap cukup kontroversial. Salahsatunya mengenai isu perubahan iklim. Donald Trump seakan telah menggagalkan upaya yang telah dibangun Obama sebelumnya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat kontradiktif dengan apa yang menjadi kebijakan Obama terdahulu.

Donald Trump terkenal sebagai salahsatu dari sebagian orang yang termasuk ke dalam para penyangkal perubahan iklim. Bahkan sebelum menjabat sebagai kepala negara ketika beliau masih dalam masa kampanye, Trump telah berkali-kali menyatakan sikap skeptisnya terhadap isu perubahan iklim. Pernyataan itu dituliskan dalam media seperti yang tertulis dalam akun twitternya, hingga pernyataan yang dilontarkannya langsung dalam pidato dan wawancara. Sikap tersebut telah jelas membuktikan bahwa Donald Trump yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat tidak mendukung adanya upaya-upaya yang dilakukan rezim lingkungan global untuk mengatasi masalah perubahan iklim.

Sikap skeptis Trump dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukannya selama beliau menjabat sebagai Presiden Amerika. Salahsatu kebijakan internasional Trump yang dianggap bersifat cukup kontroversi yaitu ditahun 2017, Presiden Donald Trump resmi menarik Amerika keluar dari Perjanjian Paris yang telah diratifikasi pada tahun 2016 ketika Amerika dibawah kepemimpinan sebelumnya. Hal tersebut menuai banyak kritikan baik dari masyarakat domestik Amerika itu sendiri, maupun dari pihak-pihak internasional yang juga terlibat dalam Perjanjian Paris mengingat besarnya posisi dan pengaruh Amerika dalam perjanjian tersebut yang menjadikan timbulnya ketergantungan pihak-pihak yang terlibat dan arah masa depan rezim terhadap keterlibatan Amerika (Rival, 2019, p. 36).

Kebijakan internasional yang telah diambil Presiden Donald Trump untuk memutuskan keluar dari Perjanjian Paris tentunya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan nasional Amerika yang akan diambilnya. Berikut penulis paparkan melalui poin-poin dibawah ini terkait kebijakan-kebijakan nasional Presiden Trump yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah mengabaikan masalah perubahan iklim dan menghapus wacana perubahan iklim dari strategi keamanan nasionalnya seperti yang dilakukan Amerika di era rezim kepemimpinan Barack Obama (Harun, 2018, p. 101).

b. Kebijakan-Kebijakan Presiden Trump terhadap Isu Perubahan Iklim.

i. Trump Menyetujui Proyek Jalan Pipa XL Stone

Setelah selama lima tahun lamanya Proyek Jalan Pipa XL Stone mengalami penolakan pada periode kepemimpinan Obama, namun ditahun 2017 ketika berganti kepemimpinan Presiden Trump justru menyetujui proyek tersebut. Trump menganggap bahwa proyek tersebut merupakan proyek yang luar biasa dan tindakannyanya ini dianggap sebagai tindakan yang benar karena pipa minyak dianggap lebih aman dibanding metode transportasi minyak lainnya.

Sejak diumumkan secara resmi bahwa Trump menyetujui Proyek Jalan Pipa XL Stone, Departemen Luar Negeri langsung mengeluarkan izin resmi bagi Trans Kanada. Oleh karena itu, dibawah

kepemimpinan Trump, proyek tersebut mampu beroperasi kembali. Namun hal ini tidak terlepas dari banyaknya protes-protes yang datang termasuk dari aktivis-aktivis yang sebelumnya mendukung kebijakan Obama untuk tidak menyetujui beroperasinya proyek lintas batas negara tersebut (Jeremy, 2017).

ii. Diaktifkan Kembali Operasional Alaska Artic untuk Pengeboran Minyak

Setelah berhenti sejak tahun 1980 karena dinilai mampu membahayakan ekosistem laut akibat tumpahan minyaknya, pengeboran minyak yang dilakukan dikawasan Alaska Artic kini dibuka kembali pada era rezim Trump. Hal ini dilindungi dan diatur dalam undang-undang Amerika. Presiden Trump bahkan berencana untuk membuka kawasan lepas pantai lainnya seperti di Negara bagian California dan Florida untuk dilakukan pengeboran minyak (Fears, 2018).

Trump telah memerintah suatu divide khusus dari departemen dalam negeri *The Bureau of Land Management* (BLM) agar melakukan penelitian untuk menjadikan beberapa tempat sebagai rekomendasi pengeboran minyak lainnya. Menurut pemerintahannya, dengan kebijakan ini maka akan membawa Amerika Serikat menjadi Negara adikuasa terkuat dalam hal energi sehingga hal ini mampu menjadikan Amerika untuk tidak tergantung dengan minyak-minyak yang bersumber dari luar negeri

bahkan dapat mengekspor sebagian energinya keluar untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar dunia (VOA, 2018).

iii. Meningkatkan Kembali Energi Batubara di Amerika Serikat

Dibawah kepemimpinanya, Presiden Trump mengeluarkan kebijakan terkait energi batubara dimana Trump ingin kembali meningkatkan energi batu bara yang mana selama beberapa tahun belakangan banyak perusahaan batubara gulung tikar karena menurunnya ekspor dan produksi akibat mulai berkembangnya gas alam dan energi terbarukan. Menurut catatan Departemen Energi, sejak tahun 2002 hingga 2016 terdapat sekitar 531 unit pembangkit listrik tenaga batubara yang sudah tidak beroperasi lagi.

Pemerintah berencana untuk mensubsidi pasokan listrik dan batubara untuk stabilitas jaringan listrik. Menurut Departemen Energi, batubara dan nuklir adalah bagian keseluruhan dalam pembuatan jaringan listrik yang kuat dan andal. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang menjadi pemerintahan Obama terdahulu dimana lebih melihat akan dampak terhadap kenaikan emisi karbon akibat dari penggunaan batubara (Fransisca, 2018).

iv. Menyetujui Penggunaan Pestisida Kontroversial

Penggunaan pestisida seperti klorpirifos yang digunakan untuk tanaman akan menyebabkan sejumlah kerusakan pada

anak-anak khususnya otak bagian tubuh terpenting dari manusia. Ditahun 2016 Obama dan EPA telah melakukan pelarangan terkait penggunaan pestisida kontroversial tersebut. Obama juga memberikan sanksi berat bagi perusahaan yang menggunakan pestisida tersebut. Seperti contohnya ditahun 2016 Obama memberikan sanksi kepada perusahaan *Biotech Swiss Syngenta AG Giant* untuk membayar denda atas perbuatannya sebesar \$4,8 juta dolar.

Namun ketika Amerika Serikat berganti kepemimpinan, Trump mengajukan diskusi terbuka mengenai pelarangan bahan kimia tersebut. Trump memberikan denda yang jauh lebih rendah bagi perusahaan yang ditemukan menggunakan unsur pestisida berbahaya jika dibandingkan dengan Obama. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa Trump tidak terlalu mempermasalahkan penggunaan pestisida tersebut selagi itu demi kebaikan untuk memajukan Amerika itu sendiri (Dhuha, 2018, pp. 66-69).

v. Kembali Memperbolehkan Penggunaan Timah dan Botol Air Minum dikawasan Taman Nasional

Setelah beberapa tahun Obama mengeluarkan kebijakan berupa pelarangan penggunaan timah dan botol air sekali pakai di kawasan taman nasional, Presiden Trump justru kembali memperbolehkan penggunaan barang-barang tersebut. Trump membebaskan penggunaan barang-barang tersebut tanpa mempertimbangkan kerugian dan dampak-dampak yang akan timbul kedepannya. Hal ini

tentu mengundang banyak protes dari berbagai aktivis yang peduli terhadap lingkungan. Kebijakan-kebijakan yang diambil Trump dianggap benar-benar tidak memperhatikan kesehatan lingkungan (Dhuha, 2018, p. 62).

vi. Menghentikan Agenda *Clean Power Plan*

Banyak kebijakan-kebijakan Trump yang justru mengubah drastis arah kebijakan Obama sebagai presiden sebelumnya. Salahsatunya yaitu mengenai kebijakan yang dibuat oleh Obama sebagai bentuk implementasi dari setujunya Amerika terhadap Perjanjian Paris yaitu *Clean Power Plan*. Kebijakan yang telah diatur sedemikian rupa tersebut justru dihentikan oleh Trump. Trump menganggap bahwa perubahan aturan ini mampu mengurangi beban-beban yang akan ditanggung oleh perusahaan dengan tidak memaksakan perusahaan tersebut untuk meningkatkan kontrol polusi (Widakuswara, 2018).

vii. Sistem Pemantauan Karbon NASA Diakhiri

Carbon Monitoring System (CMS) yang dilakukan NASA atau istilah lainnya yaitu Sistem Pemantauan Karbon merupakan suatu sistem yang dibentuk untuk melakukan pemantauan emisi karbon global agar diverifikasi berapa peningkatan pertahunnya. Sejalan dengan kebijakan kontroversialnya untuk menarik Amerika dari Perjanjian Paris, maka Trump menganggap sistem ini sudah tidak berguna lagi bagi Amerika. Oleh karena

itu Presiden Trump memutuskan untuk mengakhiri Sistem Pemantauan Karbon yang dilakukan oleh NASA di kawasan Amerika Serikat.

Kebijakan untuk mengakhiri Sistem Pemantauan Karbon dianggap Trump sebagai kebijakan yang tepat karena sistem tersebut dinilai justru merugikan Amerika dan membuat negara tersebut tidak mampu bergerak bebas dalam perindustrian. Dengan mengakhiri sistem pemantau tersebut, diharapkan akan menjadikan perindustrian Amerika menjadi lebih baik. Namun seperti pada kebijakan-kebijakan kontroversial Trump lainnya, kebijakan ini juga mengundang banyak kritikan dari berbagai pihak. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai sebagai suatu kesalahan besar karena akan membahayakan rencana verifikasi pengurangan emisi nasional yang telah disepakati sebelumnya (Voosen, 2018).

Paparan di atas telah menjelaskan bagaimana Presiden Obama dan Trump menyikapi isu lingkungan khususnya mengenai masalah perubahan iklim. Terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan arah kebijakan luar negeri diantara kedua presiden yang kemudian mempengaruhi kebijakan-kebijakan nasional yang diambilnya. Untuk lebih jelasnya, berikut akan penulis rangkum dan bandingkan bagaimana sikap dan kebijakan yang diambil oleh Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump dalam merespon isu lingkungan (perubahan iklim) dalam tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2

Sikap serta Kebijakan Obama dan Trump

Isu	Obama	Trump
Sikap	-Kooperatif -Mendukung upaya rezim (dukungan dana & promosi ke negara lain)	-Konfrontatif
Kebijakan	-Menanda tangani & meratifikasi Perjanjian Paris	-Menarik Amerika dari Perjanjian Paris

(Data diolah dari berbagai sumber)

Perbedaan Kebijakan yang terjadi antara Presiden Barack Husein Obama yang cenderung pro terhadap upaya mengatasi masalah perubahan iklim dengan kebijakan Presiden Donald Trump yang cenderung justru mengabaikan upaya-upaya dalam mengatasi masalah perubahan iklim disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi diantara keduanya. Penjelasan terkait perbedaan persepsi tersebut akan dijelaskan pada bab selanjutnya.